

BAB II

GAMBARAN UMUM NILAI-NILAI YANG DIANUT MASYARAKAT THAILAND DAN MUNCULNYA GERAKAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER DI THAILAND

Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Thailand tidak terlepas dari adanya pemikiran atau konsep yang bersifat konvensional yang berasal dari masyarakat asli Thailand (Thai) dimana nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh unsur-unsur spiritual dalam agama Buddha Theravada yang telah dianut oleh leluhur hingga generasi Thailand hingga saat ini. Ajaran agama Buddha Theravada tersebut diketahui melarang adanya gaya hidup yang dianut oleh Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender karena hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep ajaran Buddha yang sangat mendasarkan pada peran seksual manusia dengan tugas dan kewajibannya di dunia secara biologis.

Sehubungan dengan nilai-nilai ajaran Buddha tersebut, beberapa masyarakat Thailand tidak secara keseluruhan menerima konsep spiritual Buddha Theravada secara keseluruhan. Masyarakat yang dimaksud adalah golongan urban di Thailand terutama di kota-kota besar di mana mereka mengadopsi gaya hidup yang berbasis kemajuan budaya dan teknologi sehingga membentuk identitas pribadi yakni terciptanya komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

A. Pergeseran Nilai-Nilai Yang Dianut Masyarakat Thailand

1. Nilai-nilai Yang Dipegang Masyarakat Konvensional (Thai) Di Thailand

Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami masa penjajahan oleh negara manapun sehingga masyarakat Thailand dapat menumbuhkan perdamaian dan

menghindari permusuhan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. (Cipto, 2007) Masyarakat Thailand juga mudah dalam menyesuaikan diri dengan proses modernisasi ala Barat. Penduduk Thailand terbagi menjadi beberapa suku dengan suku asli yang disebut “Thai” sebagai suku mayoritas sebesar 75%, suku Cina sebesar 14%, dan yang lain adalah suku Melayu, Mon, Khmer, Laos, Vietnam, dan India.

Mayoritas penduduk Thailand merupakan penganut Budha dimana ajarannya telah mempengaruhi struktur kebudayaannya sehingga secara tidak langsung telah membentuk identitas budaya bagi masyarakat Thailand yang teguh pada kemerdekaan, kebijaksanaan diplomasi, kesetiaan kepada monarki serta tercipta keyakinan yang mengakar dalam ajaran Buddha. Identitas masyarakat Thailand yang berdasarkan pada ajaran Budha tersebut menghasilkan nilai-nilai atau norma yang dijunjung tinggi yakni nilai-nilai yang dipengaruhi oleh Konfusianisme, seperti berbakti, menghormati berdasarkan usia, senioritas dan hierarki, wajah, rasa hormat, martabat, kehormatan, persahabatan sejati, tidak menyukai keangkuhan dan kesombongan, minat dalam belajar, dan keyakinan dalam moderasi (Nguyen, 2005).

Ajaran Budha yang mereka anut juga mengajarkan tentang perdamaian dan harmoni, menghindari konflik atau menampilkan emosi karena mereka diajarkan untuk tidak membantah atau menyuarakan pandangan yang kontras. Sistem tradisional atas nilai-nilai dan perilaku sebagian besar masyarakat Thailand juga menggunakan ajaran Buddha Theravada yang merupakan mayoritas yang dianut masyarakat. Ajaran ini mempercayai dan berasumsi tentang eksistensi beberapa jenis roh (*phi*) yang mempengaruhi kesejahteraan manusia.

Agama Buddha di Thailand juga sangat dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional mengenai roh leluhur dan alami, yang telah dimasukkan ke dalam kosmologi Buddhis dan hal ini dibuktikan dengan kebanyakan orang Thailand memasang rumah roh (Thai: ศาลพระภูมิ; RTGS: *san phra phum*), miniatur rumah di luar tempat tinggal mereka, di mana mereka percaya roh rumah tangga hidup. Mereka juga menyajikan persembahan makanan dan minuman kepada roh-roh ini untuk membuat mereka bahagia. Jika roh-roh ini tidak bahagia, diyakini bahwa mereka akan mendiami rumah tangga dan menyebabkan kekacauan. Rumah-rumah roh ini dapat ditemukan di tempat-tempat umum dan di jalan-jalan di Thailand, di mana masyarakat membuat penawaran (Cornwell-Smith, 2005).

Ajaran Buddha merupakan hal yang paling fundamental atau mendasar bagi masyarakat Thai khususnya ajaran Buddha Theravada yang dianut sekitar 90% dari jumlah penduduknya. Masyarakat Thailand juga telah mengalami modernisasi yang ditandai dengan penggunaan teknologi komunikasi canggih, metode pertanian ilmiah, produksi industri, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan. Masyarakat Thailand konvensional yang memeluk ajaran Buddha mengapresiasi ajaran Buddha sebagai ajaran yang harus dijalankan secara keseluruhan seperti penghargaan terhadap organ tubuh manusia yakni kepala orang lain tidak boleh disentuh, kecuali dalam kasus bayi, anak kecil, atau mungkin teman sebaya dalam satu keluarga dekat sendiri (Hoare, 2004).

Sebagai bagian tubuh yang paling bawah (juga bagian tubuh yang berjalan di tanah), kaki harus selalu terlipat di bawah tubuh ketika seseorang duduk di lantai, mereka tidak pernah diperpanjang ke arah

orang lain. Seperti setiap budaya Asia Timur dan Tenggara, sepatu selalu dilepas sebelum memasuki rumah, baik itu tempat tinggal sendiri atau rumah orang lain. Rumah itu seperti ruang suci, dan kotoran dan debu dari jalan harus ditinggalkan di depan pintu. Meskipun beberapa orang urban Thailand menggunakan sandal rumah ringan di dalam rumah mereka, mayoritas lebih suka pergi tanpa alas kaki dan cara berpakaian sangat konservatif di depan umum yang berarti bahwa tidak ada celana pendek kecuali jika ada di rumah (biasanya hanya anak-anak memakai celana pendek), tidak ada baju tanpa lengan yang memperlihatkan bahu, dan tidak ada rok atau gaun yang lebih pendek dari panjang lutut.

2. Perkembangan Nilai-Nilai Yang Dianut Masyarakat Urban di Thailand

Masyarakat Thailand di kota-kota besar seperti di Bangkok atau Chiang Mai, telah mengalami kemajuan budaya dan terkadang terdapat perselisihan antara identitas budaya seseorang sebagai identitas pribadi yang didalamnya termasuk identitas seksual dari masyarakat urban atau sub-urban seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender sebagai akulturasi budaya barat dengan budaya kelompok yang masih menjunjung tinggi ajaran Budha.

Masyarakat urban atau suburban Thailand tersebut juga hidup dengan kenyamanan komunikasi modern dan teknologi informasi, transportasi massal cepat, restoran cepat saji, konsumerisme, kemakmuran, *fashion sense*, serta kebebasan individu yang lain (Hoare, 2004). Jika dipandang dari unsur keagamaan Budha, para komunitas LGBT juga memeluk ajaran Budha terkait dengan materi ajaran tentang melepaskan hal-hal keduniawiannya untuk

mencapai kesempurnaan hidup dengan tujuan memperoleh hak surgawi tanpa harus mendasarkan pada ajaran fundamental Budha seperti cara berpakaian dan lain-lain.

Di satu sisi, masyarakat Thailand modern yang didalamnya terdapat kaum LGBT tidak terlalu menganggap tentang kesucian organ kepala dan kaki dan cara berpakaian yang telah mengadopsi budaya barat seperti menggunakan celana pendek, baju tanpa lengan yang memperlihatkan bahu, dan rok atau gaun yang lebih pendek dari lutut. Peristiwa tersebut menimbulkan reaksi emosional yang kuat antara masyarakat modern khususnya para komunitas LGBT dengan masyarakat konvensional satu sama lain karena masyarakat Thailand konvensional yang memeluk ajaran Budha mengapresiasi ajaran Budha sebagai ajaran yang harus dijalankan secara keseluruhan seperti penghargaan terhadap organ tubuh manusia yakni kepala orang lain tidak boleh disentuh, kecuali dalam kasus bayi, anak kecil, atau mungkin teman sebaya dalam satu keluarga dekat sendiri.

Hal ini membuat terjadinya pergeseran interaksi sosial antara kaum LGBT dan masyarakat konvensional Thailand dimana kaum LGBT menjalankan ajaran Budha yang diakulturasikan dengan budaya Barat dan sebaliknya masyarakat konvensional masih tetap menjalankan nilai-nilai ajaran Budha yang mendasar.

B. Sejarah Dan Gerakan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender) Di Thailand

1. Sejarah Munculnya Komunitas LGBT di Thailand

Munculnya komunitas LGBT di Thailand tidak terlepas dari suatu kepercayaan dalam agama Budha yakni *Theravada buddhism* sebagai suatu

reinkarnasi sehingga orang Thailand sering percaya bahwa kaum LGBT dilahirkan sebagai hasil dari tindakan mereka di kehidupan masa lalu. Keyakinan seperti itu juga dipengaruhi oleh kisah *Ruja* di *Mahanaratakasapa Jataka* yang mengatakan bahwa mereka terlahir sebagai "homoseksual laki-laki", "homoseksual perempuan", "biseksual" dan "transgender" sebagai cerminan di kehidupan mereka sebelumnya karena melakukan perzinahan (Royal Thai Buddhist Scriptures, 2012).

Pada catatan Buddhis juga menggambarkan perilaku laki-laki non-heteronormatif yang dapat ditemukan dalam kitab suci *Buddha Jataka* yang juga dikenal sebagai *Pali Canon* (Jackson, 2006).

Pada kitab suci *Buddha Jataka* menyebutkan tentang kondisi spesifik dari jenis kelamin seseorang yang dikategorikan menjadi empat jenis gender yakni laki-laki, perempuan, *ubhatpbyanjanaka* dan *pandaka* dimana *ubhatpbyanjanaka* dan *pandaka* berarti *hermaprodit* atau individu yang mengandung organ laki-laki dan perempuan serta waria laki-laki dan homoseksual (Jackson, 1997a).

Konsep-konsep ini juga diungkapkan oleh Peter A. Jackson yakni seorang sarjana terkemuka yang ahli dalam budaya, agama, dan seksualitas di Thailand dalam tulisannya yang berjudul "*whether or not Buddhism has been instrumental in influencing the development of the popular Thai notion, a very similar mixing of physical and psychological sex, gender behaviours and sexuality occurs both in the Pali terms pandaka and in the Thai term kathoey*". Hal ini berarti bahwa ajaran *Theravada buddhism* secara tidak langsung telah membentuk seseorang untuk menjadi kaum LGBT terkait dengan ajaran seksualitas yang dapat diperankan oleh jenis kelamin laki-laki dan perempuan ataupun oleh kedua gender pada saat melakukan aktivitas seksualitas dan hal ini dapat

memperngaruhi psikologis setiap gender dalam mengekspresikan perannya dalam seksualitas.

Perilaku homoseksualitas dan perilaku non-heteronormatif yang umum di antara anggota laki-laki dan perempuan juga pernah terjadi di Pengadilan Thailand saat periode *Ayutthaya* pada masa pemerintahan *King Trailok* dimana dia mengeluarkan keputusan kerajaan yang melarang perilaku sesama jenis atau *Len-Peuen* di antara wanita istana. Apabila hal itu dilanggar, maka hukumannya adalah menerima 50 cambukan dari cambuk kulit, mendapatkan tato di sekitar leher dan diarak di sekitar dinding istana dan *Len-Sawat* adalah istilah lama untuk homoseksualitas di antara anggota pengadilan laki-laki.

Kisah munculnya LGBT juga pernah terjadi dan dialami oleh salah satu bangsawan yang bernama Hmom Kraisorn dimana orang istana memiliki dugaan bahwa dia memiliki keintimann dengan seorang pria yang juga seorang penampil atau penghibur istana (*History of Thai LGBTs*, 2009).

Pada tahun 1932, Thailand telah beralih dari negara monarki absolut ke monarki konstitusional sehingga selama waktu itu konsep "budaya nasional" diperbanyak dan akhirnya mempengaruhi perspektif publik hingga hari ini. Konsep-konsep tradisional tentang gender merupakan salah satu alat yang dilaksanakan oleh negara Thailand sebagai mekanisme untuk membangun tatanan sosial (Barme, 1993; Winichakul, 1994) yang sesuai dengan filsafat agama. Mekanisme tersebut menjelaskan tentang bagaimana "wanita dan pria Thailand" harus mengekspresikan seksualitas mereka walau mereka telah berada pada peradapan baru yakni kehidupan pada aspek pendidikan melalui sekolah, polisi dan militer sehingga menimbulkan persepsi sosial masyarakat Thailand dimana seseorang akan dapat dilihat kebajikan hidupnya yang dinilai dari bagaimana

seseorang mengekspresikan dirinya secara seksual yang mendasarkan pada filsafat dan agama ataupun tidak.

Pada tahun 1950-an, orang dengan identitas LGBT meningkat dan terdiversifikasi lebih lanjut dengan masuknya ekspatriat Barat dari beragam latar belakang setelah Perang Dunia Kedua. Peningkatan pesat media pada 1950-an dan dampak globalisasi dalam dekade-dekade berikutnya juga memberikan lebih banyak visibilitas dan informasi tentang gender dan seksualitas. Hal ini juga menyebabkan munculnya aktivis LGBT kontemporer dan perkembangan identitas seksual mereka dan konseptualisasi Thailand modern tentang orientasi seksual dan identitas gender, komersialisasi dan budaya terus berkembang melalui pengenalan dan perluasan liputan media tersebut (*History of Thai LGBTs*)

Pada akhir abad 20, pertumbuhan ekonomi di Thailand mempengaruhi perkembangan kehidupan LGBT secara kontemporer, dimana banyak budaya LGBT modern Thailand berpusat pada kapitalisasi perdagangan LGBT di Thailand yakni bisnis atau usaha mereka di bidang wisata untuk wisatawan asing LGBT yang dipromosikan oleh Otorita Pariwisata Thailand, dan terus menjadi tujuan wisata seks dengan distrik-distrik dan bar-bar lampu merah yang memajukan laki-laki gay dan perempuan transgender (Jackson, 2011).

Jika dipandang dari sudut perkembangan global, individu LGBT di Thailand saat ini menikmati lebih banyak kebebasan dalam mengekspresikan identitas mereka di luar dikotomi maskulin atau feminin karena adanya advokasi global di dunia untuk melindungi hak LGBT pada Konstitusi tahun 1997, yang dikenal sebagai "Konstitusi Rakyat" untuk melembagakan perubahan demokratis ini. Konstitusi ini mengabadikan katalog komprehensif tentang 40

hak asasi manusia, dan membentuk organ khusus, Komisi Hak Asasi Manusia Nasional atau *National Human Rights Commission* (NHRC), yang bertugas melindungi dan menjamin hak-hak ini atas nama rakyat Thailand. Banyak anggota NHRC yang baru dibentuk menarik perhatian pada isu-isu LGBT (Yongstar, 2015).

Peristiwa sejarah munculnya LGBT dari jaman kerajaan hingga saat ini membuat kaum LGBT menjadi tumbuh berkembang hingga periode sekarang karena diikuti oleh gaya hidup yang mengadopsi budaya Barat sebagai bentuk akulturasi budaya oleh para LGBT. Sehubungan dengan hal tersebut, jumlah kaum LGBT makin tumbuh subur dan berkembang di Thailand sehingga masyarakat Thai menyebut dengan istilah "*Kathoei*" yakni sebutan terhadap para lelaki Thailand yang menjadi transgender wanita dan keterlibatan mereka dalam komunitas makin marak hingga akhir ini apalagi setelah munculnya konvensi perlindungan dari dunia untuk hak-hak mereka.

Di satu sisi, masyarakat Thailand (Thai) memiliki kecenderungan untuk menciptakan mural di dinding dan dapat ditemukan di kuil-kuil dimana mural tersebut menggambarkan perilaku homoseksual di antara lelaki dan wanita Thailand (Hauser, n.d.) sehingga menimbulkan sentimen psikologis para LGBT untuk lebih memperbanyak jumlah mereka di Thailand.

Komunitas LGBT makin marak setelah pemerintah Thailand melakukan upaya "*Westernisasi*" dengan menghapuskan monarki absolut dan pelembagaan konstitusi pertama Thailand untuk mengembangkan Thailand dengan memprioritaskan golongan kelas menengah sehingga menambah seksualitas ke gender sebagai konsep yang harus dinilai sehingga dunia media mulai menciptakan

liputan berita tentang homoseksualitas yang dirasa publik sebagai berita sensasional.

2. Gerakan LGBT Di Thailand

Gerakan LGBT di Thailand tidak lepas dari maraknya jumlah anggota komunitas LGBT itu sendiri dimana salah satu komunitas terbesar LGBT dengan orientasi seksual lesbian yang terkenal dengan nama komunitasnya yakni *Anjaree* yang berlokasi di kota Bangkok merupakan komunitas yang dibentuk pada awal tahun 1986 oleh kaum perempuan Thailand (Sinnott, 2011).

Tujuan dibentuknya komunitas ini adalah sebagai bentuk aksi protes terhadap diskriminasi kaum perempuan di Thailand yakni berupa sebuah gerakan dalam mengkampanyekan hak-hak kaum wanita serta perlindungan terhadap mereka.

Komunitas ini diketuai oleh seorang lesbian yang telah ditunjuk oleh para anggotanya. Di satu sisi, sebagian besar anggota komunitas ini adalah kaum lesbian sehingga seiring dengan berjalannya waktu, seluruh anggota komunitas ini mendeklarasikan dirinya sebagai kaum lesbian.

Komunitas *Anjaree* pada awalnya hanya beranggotakan beberapa orang saja namun saat ini telah memiliki anggota yang banyak dan terus bertambah tiap waktu sehingga perlu dibentuk sekretariat sebagai posko untuk melakukan kegiatan mereka agar lebih terorganisir secara efisien. Selanjutnya mereka merambah dunia teknologi informasi yakni dengan menginformasikan segala aktifitas mereka melalui internet dalam bentuk *official web page*. Melalui sarana teknologi informasi tersebut mereka membeberkan semua kegiatan mereka seperti aksi protes kekerasan terhadap kaum perempuan dengan menyuarakan hak mereka terhadap pemerintah

Thailand untuk menciptakan upaya perlindungan terhadap kaum wanita (Sinnott, 2011).

Komunitas *Anjaree* juga menyuarakan pendapat mereka berupa kritik pedas terhadap Institut Rajabhat yang mengeluarkan kebijakan untuk tidak menerima mahasiswa yang memiliki orientasi seksual sebagai transgender. Mereka menyatakan bahwa hak memperoleh pendidikan merupakan hak setiap orang tanpa memandang orientasi seksualnya sehingga kebijakan kampus ini dipandang sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum transgender (UNDP & USAID, 2014).

Gerakan komunitas ini telah menjangkau di hampir area Asia dan bagian dunia internasional pada tahun 1990 sehingga untuk mempermudah perluasan jangkauan, komunitas ini juga bekerjasama dengan komunitas lesbian di internasional sehingga mampu menarik perhatian dunia tentang perlunya keberadaan mereka saat ini sekaligus dapat menyatakan bahwa LGBT adalah golongan kaum minoritas yang perlu dilindungi sebagai bentuk penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia.

Komunitas *Anjaree* juga diketahui telah berkali-kali melakukan kampanye di berbagai tempat untuk mendorong pemerintah Thailand segera mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Gender Ketiga bagi kelangsungan hidup mereka dimana gerakan kampanye tersebut juga mereka lakukan dengan berdialog kepada beberapa anggota parlemen pemerintah atau CDA untuk penciptaan RUU tersebut.

Komunitas lesbian berikutnya yang juga memiliki anggota lesbian terbanyak Thailand adalah *Sapaan* dimana komunitas ini menyuarakan hak-haknya sebagai kaum lesbian untuk diperlakukan sama dalam interaksi sosial di Thailand pada beberapa aspek kehidupan seperti aspek pendidikan, pekerjaan,

tempat tinggal dan peran sosial yang lain sehingga komunitas ini menentang keras segala bentuk diskriminasi terhadap mereka baik yang berasal dari masyarakat Thailand maupun pemerintah sekalipun.

Sapaan juga menggunakan teknologi informasi (Sanders, 2011) sebagai sarana media untuk memperoleh pengakuan publik dan menjangkau jumlah anggota agar semakin bertambah serta membuat pamflet pada periode tertentu yang berisi tuntutan kepada pemerintah Thailand untuk melegalkan orientasi seksual mereka melalui penciptaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Gender Ketiga melalui kampanye antar komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender.

Selain *Anjaree* dan *Sapaan*, ada pun komunitas transgender yaitu *Thai Trans Female Association Of Thailand (TFAT)* dimana komunitas ini memiliki ketua yang seorang transgender. Komunitas *Transfemale Association Of Thailand (TFAT)* juga secara terbuka menyerukan perubahan seks yang didanai negara dan memiliki kesamaan dengan *Anjaree* serta *Sapaan* yakni merambah dunia teknologi informasi melalui *official web page* sebagai sarana dalam aksi protes kekerasan terhadap kaum transgender dengan menyuarkan hak mereka terhadap pemerintah Thailand untuk menciptakan upaya perlindungan terhadap kaum transgender Thailand serta mengkampanyekan pariwisata, layanan pendidikan yang lebih baik untuk remaja, layanan dukungan untuk lansia dan saluran bantuan darurat 24-jam (Winn, 2012).

Komunitas LGBT di Thailand yang fokus utamanya adalah para gay atau kaum homoseksual laki-laki adalah *Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT)* yang berlokasi di Bangkok. Komunitas ini merupakan komunitas homoseksual dan laki-laki yang berhubungan seks dengan pria, wanita, wanita, wanita

dan transgender dengan gerakan aksinya yakni menuntut keabsahan orientasi seksualnya melalui beberapa kampanye yang dilakukan di Thailand ataupun dunia internasional dimana dalam aksinya tersebut mereka juga menuntut kepada pemerintah Thailand untuk segera mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Gender Ketiga sehingga mereka terhindar dari segala bentuk diskriminasi sosial dari berbagai aspek kehidupan.

Komunitas *Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT)* diketahui juga bekerjasama dengan organisasi Perdamaian Bangsa-Bangsa yang melegalkan keberadaan kaum LGBT yakni OHCHR dan UNDP melalui komunikasi yang intensif lewat alamat website yang diberikan oleh organisasi dunia tersebut sehingga hal ini dapat menjadi sarana mereka untuk mendorong pemerintah Thailand dalam melegalkan keberadaan mereka di masyarakat.

Komunitas LGBT di Thailand yang beranggotakan para gay atau kaum homoseksual laki-laki selain *Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT)* adalah *Bangkok Rainbow* yang berlokasi di Bangkok. Komunitas ini merupakan komunitas homoseksual laki-laki yang juga memiliki gerakan aksinya yakni menuntut keabsahan orientasi seksualnya yang juga dilakukan melalui beberapa kampanye di Thailand ataupun dunia internasional dimana dalam aksinya tersebut mereka juga menuntut kepada pemerintah Thailand untuk segera menciptakan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) Gender Ketiga sebagai motivasi mereka untuk terhindar dari segala bentuk diskriminasi sosial dari berbagai aspek kehidupan.

Komunitas *Bangkok Rainbow* diketahui juga telah bekerjasama dengan organisasi Perdamaian Bangsa-Bangsa yang melegalkan keberadaan kaum LGBT yakni OHCHR dan UNDP melalui komunikasi

yang intensif dan aktif dalam website yang diberikan oleh organisasi dunia tersebut sehingga dapat menjadi sarana mereka untuk mendesak pemerintah Thailand segera melegalkan keberadaan mereka di masyarakat.

Selanjutnya adalah komunitas Transgender di Thailand yakni *Thai Transgender Alliance*, dimana pada tahun 2015 komunitas ini memiliki target untuk meraih pencapaian besar dalam merekrut anggotanya hingga saat ini (Alturi, 2015).

Pada tahun 2015 mereka bergabung dengan aliansi lesbian, gay dan biseksual untuk mengkampanyekan terciptanya Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga terhadap pemerintah Thailand agar terhindar dari bentuk diskriminasi sosial Thailand dimana kampanye tersebut terus dilakukan secara intensif hingga saat ini.

Peristiwa sejarah munculnya LGBT dari jaman kerajaan hingga saat ini membuat kaum LGBT menjadi tumbuh berkembang hingga periode sekarang karena diikuti oleh gaya hidup yang mengadopsi budaya Barat sebagai bentuk akulturasi budaya oleh para LGBT hingga pada akhirnya mereka memiliki keberanian untuk mengadakan aksi atau gerakan terkait dengan legalisasi status mereka di Thailand terhadap pemerintah Thailand sehubungan dengan status hukum mereka yang diaktualisasikan melalui Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga

Komunitas LGBT di Thailand yaitu *Anjaree*, *Sapaan*, *Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT)*, *Bangkok Rainbow*, dan *Thai Transgender Alliance*, merupakan salah satu fenomena yang menjadi perhatian publik hampir di seluruh dunia terkait dengan sejarah munculnya mereka pada beberapa abad yang lalu hingga periode saat ini. Perkembangan jumlah kaum LGBT di Thailand selain dipengaruhi oleh sejarah juga tidak terlepas dari peran Organisasi Perdamaian Bangsa-Bangsa yang saat ini telah

menyatakan bahwa LGBT merupakan salah satu perwujudan dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi hak-hak sosialnya.

Hal ini menjadi suatu senjata bagi kaum LGBT di Thailand untuk lebih percaya diri dalam melakukan gerakan atau aksi mereka dalam mendorong pemerintah Thailand untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga sebagai upayanya dalam melindungi keberadaan mereka di Thailand.

Komunitas LGBT seperti *Anjaree*, *Sapaan*, *Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT)*, *Bangkok Rainbow*, dan *Thai Transgender Alliance* diketahui telah melakukan aksi atau gerakan melalui beberapa strategi yakni bekerjasama antar komunitas LGBT pada saat melakukan kegiatan kampanye anti diskriminasi terhadap ekspresi seksual mereka di Thailand.

Strategi berikutnya adalah menjalin kerjasama dengan komunitas LGBT di dunia dalam rangka mendukung gerakan mereka di Thailand berupa strategi untuk bekerjasama dengan pemerintah Thailand melalui para parlemen secara perorangan atau kelompok agar mempermudah aksi mereka selanjutnya.

Bentuk strategi komunitas LGBT di Thailand juga ditunjukkan dengan bekerjasama melalui komunikasi yang intensif terhadap Organisasi dunia yakni PBB dengan OHCHR terkait dengan proses legalisasi Hak Asasi Manusia atas status sosial mereka serta bekerjasama dengan UNDP terkait dengan perlindungan hukum keberadaan mereka di Thailand.

Bentuk strategi komunitas LGBT selanjutnya adalah komunikasi yang diadakan secara langsung terhadap anggota Constitutional Drafting Assembly (CDA) yakni parlemen di Thailand terkait dengan beberapa poin atau hal-hal yang menjadi tuntutan

mereka pada Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga meliputi anti diskriminasi sosial serta perlindungan hak-hak mereka yang sama dengan kaum non LGBT oleh pemerintah Thailand.

Strategi selanjutnya adalah komunitas LGBT di Thailand menggunakan teknologi informasi sebagai sarana media untuk memperoleh pengakuan publik dan menjaring jumlah anggota agar semakin bertambah serta membuat pamflet pada periode tertentu yang berisi tuntutan kepada pemerintah Thailand untuk melegalkan orientasi seksual mereka melalui penciptaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Gender Ketiga melalui kampanye antar komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender.

Segala bentuk strategi ini selalu dilakukan oleh komunitas LGBT di Thailand dari waktu ke waktu hingga saat ini tanpa putus asa sampai harapan mereka sehubungan dengan dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga terwujud.